



0500024185

MILIK PERPUSTAKAAN	
UNIVERSITAS ATMA JAYA	
YOGYAKARTA	
DITERIMA :	30 MAR 2000
INVENTARISASI :	020/FH/Hd-08 Pen/00
KLASIFIKASI :	Rf 346-016/Pen/p
SELESAI DIPROSES :	10 APR 2000



**STUDI KAJIAN
WANITA**

LAPORAN PENELITIAN

**PERLINDUNGAN DALAM PELAKSANAAN HUKUM
TERHADAP POSISI WANITA DALAM PERCERAIAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

E. SUNDARI, S.H

DRA. M.G.E. SUMIARNI, S.H. M.Hum.

**DIBIYAI PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN
TERAPAN DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR:
045/P2IPT/SKW/VI/1999 DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN
TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FEBRUARI, 2000**

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1.a. Judul penelitian : **PERLINDUNGAN DALAM PELAKSANAAN
HUKUM TERHADAP POSISI WANITA
DALAM PERCERAIAN DI DIY**

b. Macam penelitian : terapan

c. Kategori : II

2. Kepala Proyek Penelitian :

a. Nama lengkap dengan gelar : Elisabeth Sundari, S.H

b. Jenis kelamin : Perempuan

c. Pangkat/golongan : Penata/III-C

d. Jabatan fungsional : Lektor Muda

e. Fakultas : Hukum

f. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

g. Bidang Ilmu yang diteliti : studi kajian wanita

3. Jumlah Tim peneliti : 2 (dua) orang

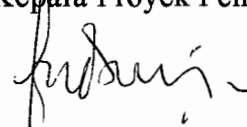
4. Lokasi penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Jangka waktu penelitian : 10 (sepuluh) bulan

6. Biaya yang diperlukan : Rp.5.000.000,-

Yogyakarta, Februari, 2000


Kepala Proyek Penelitian,


(E. Sundari, S.H)

Mengetahui,
Dekan Fak. Hukum:


(J.B. Daliyo, S.H, M. Hum.)

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian:


(Dr. Ir. F.X. Nuryadji Wibowo, M.Sc.)

**PERLINDUNGAN DALAM PELAKSANAAN HUKUM
TERHADAP POSISI WANITA DALAM PERCERAIAN DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (E.Sundari, M.G Endang
Sumiarni; 2000, 49 halaman)**

Bagi isteri yang rela tidak berkarier demi mengurus rumah tangga sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau mungkin dipaksa oleh suami untuk berhenti dari pekerjaannya untuk mengurus rumah tangga saja, kemudian tiba-tiba terjadi perceraian, maka ia akan dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus hidup mandiri, mencari nafkah sendiri dengan segala keterbatasan kemampuannya serta kekurangsiapannya. Belum lagi menghadapi kenyataan betapa sulitnya mencari pekerjaan karena persaingan semakin ketat. Keadaan demikian menyebabkan pemiskinan terhadap wanita pasca perceraian dan secara umum menurunkan tingkat kesejahteraan keluarga. Dari adanya kenyataan angka perceraian yang cenderung meningkat di wilayah DIY serta dampak perceraian bagi wanita, terutama wanita tidak bekerja, maka dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimanakah perlindungan yang diberikan dalam pelaksanaan hukum oleh hakim lewat putusannya terhadap posisi wanita dalam perceraian ?

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perlindungan hak-hak wanita dalam taraf pelaksanaan hukum, terutama dalam pelaksanaan hukum perkawinan.

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yang bersumber dari putusan-putusan perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil sampel pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman serta Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman secara *purposive sampling*, dengan tujuan agar diperoleh variasi data tentang perlindungan dalam pelaksanaan hukum yang ada karena faktor tempat dan faktor nilai agama (Islam dan non Islam). Kurun waktu data yang diteliti adalah kurun waktu sepuluh tahun silam (1988) dan

kurun waktu terdekat dengan saat ini, yakni 1997 secara *purposive sampling*, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan perlindungan hukum yang ada dengan memperbandingkan hasil data tahun 1988 dan tahun 1997. Masing-masing tahun diambil 10 putusan secara random, sehingga jumlah data putusan perceraian yang diteliti adalah 80 putusan. Data dalam putusan pengadilan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hukum berperspektif wanita.

Dari analisis terhadap data yang ada dapat diambil hasil dan kesimpulan sebagai berikut:

Tentang posisi wanita dalam perceraian, dari sisi penggunaan hak mengajukan perceraian, sudah mulai banyak wanita yang menggunakan haknya untuk mengajukan perceraian, namun masih didominasi oleh isteri/wanita yang bekerja secara produktif. Dari alasan diajukannya perceraian, posisi wanita pada umumnya masih sebagai pihak yang menjadi korban ketidakadilan, baik ketidakadilan yang bersifat umum maupun ketidakadilan yang bersifat jender.

Tentang perlindungan dalam pelaksanaan hukum terhadap posisi wanita dalam perceraian, hakim masih banyak sebagai corong Undang-Undang dan belum banyak yang memberikan perlindungan atas nama keadilan, terutama keadilan yang berperspektif wanita. Banyaknya putusan yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 dengan berbagai alasan yang ada, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap posisi wanita dalam perceraian belum banyak dilakukan oleh hakim.

Dari hasil dan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

Masih perlu adanya sosialisasi keadilan jender bagi para suami sehingga mereka tidak lagi menggunakan alasan yang berhubungan dengan kedudukan isteri apabila mengajukan perceraian. Hakim dalam memutus perkara perceraian hendaknya berpandangan sama dan tidak hanya sebagai corong Undang-undang saja, sehingga dalam pelaksanaannya lebih banyak memberikan perlindungan kepada isteri yang masih cenderung sebagai korban

(Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kontrak nomor:
045/P2IPT/SKW/VI/1999)



SUMMARY

PROTECTION IN LEGAL IMPLEMENTATION TOWARD WOMEN'S POSITION IN DIVORCE IN YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE (E.Sundari and M.G Endang Sumiarni, 2000, 49 pages)

For wives who are prepared not to work for the sake of taking care of their households as obliged by law or perhaps compelled by their husbands to stop working for only taking care of their households, then suddenly occur divorces, they face the reality that they must live on their own works, they must earn their own lives with all their limited abilities and lack of preparation. Let alone they have to face the fact that it is very difficult to get job because of strict competition. From the fact that divorce rates are increased in Yogyakarta Special Province with all their impact for women, especially for those who don't work, therefore the problem can be formulated as follows: How is the protection given in legal implementation by judges through their sentences toward women's position in divorce ?

This research aim at knowing wether there is any protection toward women'rights in legal implementation of marriage law.

The data collected are secondary data in forms of divorce sentences in Yogyakarta Special Province, by taking Yogyakarta and Sleman state courts and Yogyakarta and Sleman religion courts as samples by using purposive sampling, in the effort to get data varities on the protection in the available legal implementation because of the place and religious value factors (Islamic and non Islamic). The time periode for the data studied are within 1988 (the latest) and within 1997 (the nearest) by using purposive sampling technique in the effort to know the available legal development by comparing the data result in 1988 and the data in 1997. From each year 10 sentences are taken randomly, so that in all there are 80 sentences studied. The data collected are analysed qualitatively by using legal approach from women's perspective.

From the analysis on the available data, the result and conclusion taken are follows:

About the position of women in divorce, from the right to propose the divorce, there have been many women who use their rights to proposed divorce, but are still dominated by wives/women who work productively. From the reasons to propose the divorce, the position of women in general are as victims of injustice, both the general injustice and the injustice that is specially associated with gender.

Dealing with the protection in the legal implementation for women position in divorce, many judges are still funnels of the statutes and have not given protection on behalf of justice, especially the justice from women perspective. The great number of sentences that do not apply the stipulation of Article 41 (3) of No.1 1974 Marriage Statute with various reasons, indicate that in its implementation, the protection toward women's position in divorce has not been much carried out by judges.

From the result and conclusion above, some recommendation can be proposed as follows:

The socialization about the justice of gender is still needed for husbands so they do not use reasons dealing with the status of wives in proposing divorce. In giving divorce sentences, it would be better if judges have the same view and not only as funnels of the statute, so that in the implementation they would give more protection for wives who tend to victims in many cases.

(Faculty of Law of Atma Jaya University Yogyakarta, contract
no.045/P2IPT/SKW/VI/1999

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan, karena berkat karunia dan perlindunganNya peneliti mampu melaksanakan dan menyelesaikan laporan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan salah satu wadah pembinaan bagi peneliti sebagai dosen muda yang harus terus belajar dan berkarya agar dapat mengembangkan diri serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembangunan.

Kajian terhadap wanita, terutama dari aspek perlindungan hukum terhadap wanita, merupakan salah satu persoalan yang masih memerlukan banyak perhatian, karena masih banyak produk-produk hukum dan pelaksanaan hukum yang kurang melindungi wanita. Untuk itu peneliti mencoba mengadakan penelitian dengan mengambil judul Perlindungan Dalam Pelaksanaan Hukum Terhadap Posisi Wanita Dalam Perceraian.

Pada kesempatan ini, atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, atas kesempatan dan bantuan dana yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta c.q Ketua Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
3. Bapak/Ibu staf dokumentasi dan arsip Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Agama Sleman, atas perkenannya serta bantuannya dalam mencari bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan dorongan bagi peneliti untuk terus mengembangkan diri melalui karya penelitian.

Semoga seluruh amal dan kebaikan yang telah diberikan, mendapat pahala dari Tuhan.

Semoga karya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada studi kajian wanita serta bagi pembangunan hukum yang berperspektif wanita.

Tiada gading yang tak retak. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan, untuk sempurnanya laporan penelitian ini.

Yogyakarta, Februari, 2000

Peneliti.

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	halaman
1	Perbandingan jumlah perceraian oleh suami dan isteri	22
2	Perbandingan jumlah perceraian oleh isteri bekerja dan tidak bekerja	23
3	Perbandingan perceraian oleh suami terhadap isteri bekerja dan tidak bekerja	24
4	Alasan perceraian oleh suami terhadap isteri bekerja	25
5	Alasan perceraian oleh suami terhadap isteri tidak bekerja	28
6	Alasan perceraian oleh isteri bekerja	31
7	Alasan perceraian oleh isteri tidak bekerja	31
8	Perceraian oleh suami dengan alasan kedudukan isteri	34
9	Pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian	41
10	Penerapan Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU No.1 Tahun 1974 dalam perceraian	44

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
BAB IV. METODE PENELITIAN	18
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan seperti yang tersurat di dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah hendak menonjolkan segi spiritual dari perkawinan. Perkawinan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai perjanjian keperdataan saja yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan, atau hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai ahli warisnya kelak, atau agar seseorang mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan dan sebagainya. Pemerintah tidak menghendaki tujuan yang lain dari perkawinan selain tujuan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mendukung perkawinan yang bahagia dan kekal, sebagaimana tersurat di dalam Pasal 1 serta Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan harus didasarkan atas asas religiusitas. Ini berarti bahwa kebahagiaan akan tercapai hanya apabila kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan saling dapat melaksanakan nilai-nilai yang

disediakan oleh agama mereka serta nilai-nilai luhur lainnya secara kebersamaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun suatu perkawinan telah diselenggarakan secara sah menurut hukum agamanya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit dalam perjalanan kehidupan perkawinan jauh dari kebahagiaan itu sendiri. Tidak jarang suami isteri terlibat dalam permasalahan hidup yang menjurus pada perkecokan. Perkecokan yang timbul antara suami isteri di antaranya berakibat terjadinya perceraian.

Dari penelitian yang pernah dilakukan, ditemukan bahwa angka perceraian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam lingkungan non Islam, menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun 1988 di tiga Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (yakni Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Wates) tercatat ada 34 perceraian, tahun 1989 tercatat ada 30 perceraian, tahun 1990 tercatat ada 38 perceraian, tahun 1991 tercatat ada 41 perceraian, kemudian tahun 1992 tercatat ada 64 perceraian (E.Sundari, 1994: 39).

Perceraian dalam sebuah perkawinan membawa akibat hukum, baik bagi bekas suami, isteri maupun anak-anak mereka. Perceraian terhadap isteri juga membawa dampak yang perlu diberi perlindungan secara hukum, yang terkadang kurang diperhatikan karena belum adanya kesetaraan jender.

Di dalam Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Menurut Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, wanita lebih banyak dituntut untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial (PKK, *rewangan*, Darma Wanita, *Pangrukti Laya*, Dasa wisma, dan sebagainya). Adanya berbagai peran yang telah digariskan oleh hukum, serta tuntutan dari masyarakat ditambah kecenderungan yang terjadi dewasa ini, yakni banyak wanita yang ingin berkarier, akan menyebabkan beban kerja yang berlebihan pada wanita. Hal tersebut dapat mendorong wanita yang menikah untuk terpaksa berhenti dari pekerjaannya demi mengurus rumah tangganya serta dapat pula membatasi kesempatan bagi ibu rumah tangga untuk bekerja secara produktif ke luar rumah karena waktunya habis untuk mengurus rumah tangga yang semata-mata dibebankan kepadanya tanpa adanya pengertian dari suami untuk membantunya.

Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Marjori HS (1991: 49-50), ditemukan fakta bahwa:

1. Hanya beberapa pria saja yang mau membantu para isteri dalam merawat dan memelihara rumah tangga.
2. Bila dapat memilih, kebanyakan pria lebih suka bila pekerjaan rumah tangga ditangani isteri, anak atau pembantu rumah tangga.
3. Kebanyakan pria mengeluh bila pekerjaan rumah tangga mengganggu waktu luang di rumah.

Apabila tidak ada pengertian, dukungan serta bantuan dari suami, maka situasi tersebut dapat menjadi sumber perkecokan dan dapat menjurus pada perceraian.

Bagi isteri yang rela tidak berkarier demi mengurus rumah tangga sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau mungkin dipaksa oleh suami untuk berhenti dari pekerjaannya untuk mengurus rumah tangga saja, kemudian tiba-tiba bercerai, maka ia akan dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus hidup mandiri, mencari nafkah sendiri serta mengurus anak sendiri dengan segala keterbatasan kemampuannya serta kekurangsiapannya. Belum lagi menghadapi kenyataan betapa sulitnya mencari pekerjaan karena persaingan semakin ketat. Keadaan demikian menyebabkan pemiskinan terhadap wanita pasca perceraian dan secara umum menurunkan tingkat kesejahteraan keluarga.

Pemerintah tentu saja tidak menghendaki rakyatnya menjadi miskin dan tidak sejahtera sebagai eksis dari perceraian. Indonesia sendiri pertengahan tahun 1997 baru saja menerima penghargaan dari UNDP, karena dinilai telah berhasil dalam menekan angka kemiskinan (Kompas, 7 September 1997: 1). Penghargaan tersebut sedapat mungkin harus di pertahankan.

B. Perumusan masalah

Adanya kenyataan angka perceraian yang cenderung meningkat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengingat dampak perceraian bagi wanita, terutama wanita yang tidak bekerja secara produktif, dari sisi

hukumnya dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimanakah perlindungan yang diberikan dalam pelaksanaan hukum terhadap posisi wanita dalam perceraian ?

E.Sundari dalam penelitian terdahulu (1994: 5) telah melakukan penelitian tentang perceraian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun yang menjadi permasalahan adalah kebijaksanaan hakim dalam mengadili perceraian Katholik.

Pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan hukum berperspektif wanita.

Menurut Siti Hidayati Amal (dalam T.O Ihromi, 1995: 118) pendekatan dalam studi jender dan pembangunan dapat menggunakan:

1. Pendekatan kesejahteraan (*social welfare*)
2. Pendekatan anti kemiskinan (*anty proverty*)
3. Pendekatan efisiensi (*efficiency*)
4. Pendekatan persamaan (*equity*)
5. Pendekatan pemberdayaan (*women empowerment*).

Penelitian ini merupakan kajian salah satu produk pembangunan, yakni pembangunan di bidang hukum seperti yang tertuang dalam GBHN 1993. Di samping itu juga merupakan kajian terhadap konsep sosial yang berdampak pada wanita. Berdasarkan kajian-kajian tersebut, maka dengan menggunakan model pendekatan menurut Siti Hidayati Amal, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

1. Pendekatan kesejahteraan sosial (*social welfare*)

2. Pendekatan persamaan (*equity*)

Berkaitan dengan pendekatan yang dipergunakan serta permasalahan yang diteliti, maka konsep yang dipakai dalam memecahkan permasalahan di atas adalah:

1. Konsep tentang kesejahteraan sosial (*social welfare*)
2. Konsep tentang tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtstigheid*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dalam perspektif wanita.

Agar batas pokok permasalahan yang diteliti menjadi jelas, maka dilakukan batasan atas pokok permasalahan sebagai berikut :

Bentuk perlindungan dalam pelaksanaan hukum yang dimaksud adalah bentuk perlindungan dalam pelaksanaan hukum oleh hakim lewat putusannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian keluarga (keluarga inti) secara sosial menurut S.C Utami Munandar (1985: 39) adalah kelompok terkecil dari masyarakat atas dasar perkawinan dan terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kedudukan keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat tersebut secara yuridis lebih ditekankan lagi peranannya, menjadi sendi dasar susunan masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Peran keluarga dalam masyarakat sebagaimana ditetapkan di atas menjadi sangat penting posisinya. Rapuh kuatnya sendi susunan masyarakat menjadi tergantung dari prinsip-prinsip keluarga yang dianut.

Untuk mendukung tegaknya sendi tersebut UU No.1 Tahun 1974 telah menetapkan prinsip sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974).
2. UU No.1 Tahun 1974 mempersulit perceraian (Pasal 39 dan Penjelasan Umum).

Secara yuridis perceraian merupakan salah satu dasar putusnya perkawinan (Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974). Dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha

mendamaikan kedua belah pihak. Gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu (Pasal 22 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975). Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apabila benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri (Penjelasan Pasal 22 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975). Perceraian adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu campur tangan dari pemerintah (Soemiyati, 1982: 128), namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, yakni pengadilan.

Apabila ditelaah, tidak ada satupun Pasal tentang perceraian yang bersifat diskriminatif terhadap wanita. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Suami isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian (Pasal 40 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 66 dan 73 UU No.7 Tahun 1989).
2. Berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 serta Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, alasan-alasan diajukannya perceraian adalah:
 - a. Salah satu pihak berzinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga.
3. Adanya hak (sekaligus kewajiban) yang sama bagi bapak dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian terjadi (Pasal 41 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974).

Ketentuan tentang perceraian telah mengacu pada asas *equality* antara pria dan wanita, namun dalam pelaksanaan hukumnya belum tentu asas tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena adanya faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhinya, misalnya adanya konsep tentang kedudukan wanita dalam rumah tangga menurut perspektif jender yang berbeda dengan apa yang diatur oleh hukum perkawinan kita.

Pengertian jender adalah pola relasi pria-wanita atau sifat yang melekat pada pria dan wanita yang dikonstruksikan secara sosial (Mary Astuti, 1996: 4).

Sifat tersebut dapat dipertukarkan karena yang mengkonstruksikan adalah masyarakat atau budaya dan bukan secara kodrati. Misalnya pria kuat, sedangkan wanita lemah.

Menurut Pasal 31 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kedudukan wanita dalam rumah tangga sebagaimana dianut oleh hukum perkawinan tersebut adalah produk konsep budaya patriarki yang diangkat oleh Max Weber untuk menjelaskan organisasi rumah tangga, dimana ayah adalah tokoh dominan dan menguasai anggota rumah tangga dan produksi rumah tangga (Saparinah Sadli dan Padmonodewo, dalam T.O Ihromi, Ed.,1995: 93).

Konsep patriarki dalam hukum perkawinan menurut perspektif gender dianggap merupakan ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender adalah ketidakadilan yang disebabkan adanya konstruksi sosial tentang sifat pria-wanita dan termanifestasi dalam marjinalisasi, sub-ordinasi, stereotip, kekerasan pria terhadap wanita serta beban kerja (Mary Astuti, 1996: 6).

Menurut Ruth Tyffani B (1991: 100), ketidakadilan gender disebabkan karena adanya supremasi laki-laki atas wanita yang begitu lama, karena tidak adanya kepekaan terhadap masalah gender. Dari hasil penelitian Sri Sarituti H (dalam T.O Ihromi, 1995: 515), budaya patriarki telah mendudukkan wanita sub-ordinatif terhadap pria, dan wanita cenderung menjadi korban (*victim*).

Meminjam pembagian kebutuhan manusia menurut Maslow, S.C Utami Munandar (1985: 37) mengatakan bahwa kebutuhan wanita Indonesia kurang lebih 100 tahun yang lalu hanyalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan akan rasa cinta saja. Namun di jaman modern ini kebutuhan wanita tersebut bertambah, yakni kebutuhan akan penghargaan diri dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Sebagaimana dapat diamati, sekarang mulai banyak wanita terlibat dalam kegiatan sosial di luar rumah atau bekerja secara produktif baik di dalam atau di luar rumah.

Gerakan perlindungan terhadap wanita di Indonesia juga telah mengarah pada penghapusan diskriminasi seperti dirumuskan dalam ratifikasi Indonesia atas CEDAW dengan UU No.7 Tahun 1984 dan peningkatan peran serta kualitas wanita, memperbaiki tingkat pendapatan wanita dan kondisi ekonominya, memperbaiki tingkat pendidikan wanita serta melindungi dan memperbaiki hak-hak wanita, untuk mengejar ketertinggalan wanita relatif dengan pria. Konsep pendekatan tersebut dinamakan konsep pendekatan wanita dan pembangunan (*women and development*) (Mary Astuti, 1996: 9) yang merupakan program dari Kementrian Negara Urusan Peranan Wanita RI sesuai dengan sasaran Pelita VI tentang bidang Peningkatan Peranan Wanita.

Dengan mengacu pada pendekatan studi jender dan pembangunan yang diungkapkan oleh Siti Hidayati Amal (dalam T.O Ihromi, Ed.1995:118), gerakan manapun yang ditujukan untuk memecahkan masalah wanita tidak boleh lepas dari pendekatan kesejahteraan, pendekatan anti kemiskinan, pendekatan kesamaan dan pendekatan pemberdayaan wanita.

Menurut Ruth Tiffany B (1991: 100), satu-satunya jalan untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita karena budaya patriarki adalah dengan jalan persamaan (*equality*).

Meski wanita mulai menginginkan *equality* dengan pria di segala bidang dan saat ini sudah mulai banyak wanita berkeluarga yang juga berkarier, kenyataannya ketentuan tentang kedudukan wanita dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) serta Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang cenderung men-subordinasikan wanita terhadap pria, tetap berlaku sampai sekarang sebagai hukum positif yang juga harus ditaati.

Menurut Fire Stone sebagaimana dikutip kembali oleh Saparinah Sadli dan Sunarti Padmonodewo (dalam T.O Ihromi, Ed.1995: 95), percuma saja semua persamaan hak dan kesempatan yang dimiliki oleh kaum wanita, kalau ia tetap berperan besar dalam kegiatan reproduksi (mengurus rumah tangga).

Adanya dikotomi peran wanita tersebut eksisnya dapat menjadi pemicu perselisihan rumah tangga. Sementara perselisihan rumah tangga secara terus menerus merupakan salah satu alasan diajukan perceraian.

Majori Hanson S (1991: 21-22) menemukan fakta bahwa bagi wanita yang bekerja secara produktif (menghasilkan uang), secara ekonomi perceraian tidak begitu berdampak negatif. akan tetapi bagi wanita yang tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, perceraian dapat berdampak :

1. Ekonomis

Yakni disebabkan: berkurangnya sumber pendapatan keluarga atau sama sekali hilangnya sumber pendapatan keluarga (terutama apabila Pasal 41

ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban finansial bekas suami terhadap bekas isteri dan anak-anaknya tidak dipenuhi).

2. Psikologis

Yakni disebabkan: tidak tersalurkannya kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan akan cinta dengan baik. Meminjam skala bobot stress yang dikemukakan oleh Th.Holmes dan R.H Rahe, maka wanita tidak bekerja yang diceraikan dapat mencapai skala bobot stress 203 dan menurut Th.Holmes termasuk bobot stress yang mengancam kesehatan wanita secara serius.

Untuk mengatasi dampak ekonomis terhadap bekas isteri akibat perceraian, hukum telah memberikan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni :

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-beaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”.

Sifat peraturan tersebut adalah fakultatif, yakni pengadilan “dapat” dan bukan bersifat imperatif atau “keharusan”, sehingga dalam *law enforcement* ketentuan tersebut belum tentu dilaksanakan. Apabila hakim dalam memutus perceraian tidak mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri, maka dampak ekonomis akan tetap dialami oleh bekas isteri yang sebelumnya tidak bekerja secara produktif.

Loekman Soetrisno mempunyai pandangan bahwa kemiskinan bagi wanita berarti tidak hanya kecukupan ekonomi saja, tapi juga penderitaan fisik

maupun pengorbanan dari kehormatannya untuk berupaya mendapatkan uang, seperti menjual diri (dalam Fauzi Rizal dkk, Ed., 1993: 157).

Menurut penelitian Siti Hidayati Amal (dalam T.O Ihromi, Ed., 1995: 116), di Indonesia jumlah rumah tangga yang dikepalai wanita makin meningkat dari 14 % pada tahun 1980 menjadi 17 % pada tahun 1990 dan keadaan ekonomi rumah tangga mereka lebih miskin dari keadaan ekonomi rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

Keadaan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kesejahteraan sosial sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah untuk merealisasikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian kesejahteraan sosial menurut ukuran Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yakni:

“Suatu tatanan penghidupan dan kehidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Ketentuan hukum yang mempersulit perceraian (Pasal 39 dan Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 1974) dari perspektif wanita, akan melindungi wanita yang tidak bekerja secara produktif terhadap dampak yang dapat ditimbulkan sebagai akibat perceraian.

Dalam hal tetap terjadi perceraian, hakim mempunyai kewajiban untuk memutus berdasarkan pada apa yang menjadi tujuan pelaksanaan hukum, yakni keadilan dan kemanfaatan dalam perspektif wanita.

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya berdasarkan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan yang dikenai tindakan) melebihi norma-norma yang lain (Sudikno Mertokusumo, 1996: 65). Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yakni yang memperlakukan dan pihak yang diperlakukan, misalnya suami terhadap isteri, hakim terhadap para pencari keadilan.

Aristoteles, sebagaimana dikutip kembali oleh Sudikno Mertokusumo (1996: 65), membagi lebih lanjut isi keadilan menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menitikberatkan pada perimbangan hak, sedangkan keadilan komutatif menitikberatkan pada persamaan (*equality before the law*). Dalam perspektif wanita, titik berat keadilan yang hendak dicapai sebagaimana pendekatan yang dipakai dalam studi wanita dan pembangunan adalah *equality* atau menurut Aristoteles adalah keadilan komutatif.

Kemanfaatan yang merupakan tujuan kedua dari pelaksanaan hukum adalah kesenangan atau kebahagiaan atau kegunaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 1996: 67, 141). Jangan sampai pelaksanaan hukum justru mendatangkan keresahan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, bagi wanita pelaksanaan hukum juga harus dapat

memberikan kesenangan, kegunaan ataupun kesejahteraan bagi para wanita yang merupakan sumber daya cukup besar bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan hukum justru menyengsarakan para wanita atau tidak mensejahterakan wanita.



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, secara khusus adalah untuk mengetahui perlindungan yang dapat diberikan dalam pelaksanaan hukum oleh hakim melalui putusannya, terhadap posisi wanita dalam perceraian.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perlindungan hak-hak wanita dalam taraf pelaksanaan hukum, terutama dalam pelaksanaan hukum perkawinan tentang perceraian.

B. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum wanita dalam pelaksanaan hukum perkawinan serta adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan hukum tersebut, maka akan dapat memberikan titik penekanan yang jelas bagi pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan di bidang hukum perkawinan, terutama ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) serta Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat patriarkis serta banyak mendatangkan ketidakadilan bagi wanita.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum serta sinkronisasi hukum.

B. Sifat laporan penelitian

Sifat dari laporan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, mengenai perlindungan dalam pelaksanaan hukum terhadap posisi wanita dalam perceraian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersifat analitis karena akan dilakukan analisis terhadap aspek-aspek hukum dalam perspektif wanita yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti.

C. Bahan/materi penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, yakni UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, UU No.6 Tahun 1974

tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta PP No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, beserta putusan-putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Agama Yogyakarta serta Pengadilan Agama Sleman tentang perceraian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku bacaan serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum tertier meliputi Kamus Hukum.

D. Alat pengumpul data

Untuk memperoleh data sekunder, alat yang dipergunakan adalah dengan studi dokumen, yakni mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, buku bacaan, hasil penelitian maupun putusan-putusan pengadilan.

E. Lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian dipergunakan untuk memperoleh data tentang putusan-putusan pengadilan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian putusan-putusan pengadilan yang diambil adalah putusan-putusan pengadilan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasi dan jenis pengadilan dipilih Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman serta Pengadilan Agama Sleman. Pemilihan

lokasi tersebut adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel tidak secara acak melainkan dengan pertimbangan atau tujuan tertentu, yakni agar diperoleh variasi data tentang perlindungan dalam pelaksanaan hukum yang ada karena faktor nilai agama (Islam non Islam). Kurun waktu bahan hukum dokumen putusan pengadilan yang diteliti adalah kurun waktu sepuluh tahun silam, yakni tahun 1988 dan kurun waktu terdekat dengan saat ini, yakni tahun 1997 secara *pusposiver sampling*, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan perlindungan hukum yang ada dengan memperbandingkan hasil data sepuluh tahun silam (1988) dengan keadaan tahun 1997. Dari kedua tahun tersebut, masing-masing diambil 10 putusan secara acak, sehingga jumlah seluruh data putusan perceraian dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 putusan pengadilan.

F. Variabel data

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka variabel yang diteliti adalah:

1. Posisi wanita dalam perceraian.

Unsur yang dikaji adalah: (a) penggunaan hak mengajukan perceraian oleh suami terhadap isteri bekerja dan tidak bekerja, (b) penggunaan hak mengajukan perceraian oleh isteri bekerja dan tidak bekerja, (c) penggunaan kedudukan wanita dalam rumah tangga sebagai motif alasan perceraian oleh suami.

2. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan dalam pelaksanaan hukum lewat hakim yang memutus perkara.

Unsur yang dikaji adalah: (a) penggunaan Pasal 41 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 terhadap isteri tidak bekerja, (b) kebijaksanaan hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai motif alasan perceraian oleh suami.

G. Model penyajian dan analisis data putusan pengadilan

Model yang dipergunakan dalam penyajian hasil penelitian serta variabel yang ada disajikan dalam tabel, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari analisis atas variabel posisi wanita dalam perceraian dan perlindungan hukumnya dalam kurun waktu 1988 dan 1997 di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman, diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara induktif

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi wanita dalam perceraian

Dari data 80 putusan pengadilan tentang perceraian sebagaimana disajikan pada model (lihat lampiran), maka perbandingan jumlah antara gugatan perceraian yang diajukan oleh suami oleh suami dan oleh isteri adalah sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan jumlah perceraian oleh suami dan oleh isteri

Lokasi	perceraian oleh suami	perceraian oleh isteri
PA Yogya dan Sleman	21	19
PN Yogya dan Sleman	17	23
Jumlah	38	42

Sumber: putusan perceraian di PN dan PA di Yogyakarta dan Sleman tahun 1988 & 1997.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penggunaan hak untuk mengajukan perceraian ternyata tidak hanya dimonopoli oleh suami saja, melainkan juga oleh isteri secara berimbang. Isteri bukan lagi sekedar pihak yang selalu dalam posisi menerima perceraian dari suami, akan tetapi sudah mempunyai posisi untuk berani menggunakan haknya mengajukan perceraian apabila ada alasan untuk itu, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 beserta Pasal 19 PP No.9

Tahun 1975. Isteri sudah mulai mempunyai kesadaran serta keberanian untuk menggunakan haknya mengajukan perceraian apabila terdapat cukup alasan untuk itu. Namun demikian, dari data yang ada, tuntutan cerai tersebut terutama kebanyakan dilakukan oleh isteri yang bekerja. Tuntutan perceraian yang diajukan oleh isteri yang tidak bekerja jumlahnya relatif kecil. Hal tersebut nampak dalam putusan pengadilan sebagaimana tertuang pada tabel 2.

Tabel 2: Perbandingan jumlah perceraian oleh isteri bekerja dan tidak bekerja.

Perceraian oleh isteri bekerja	Perceraian oleh isteri tidak bekerja	Jumlah
34	8	42

Sumber: Putusan perceraian di PN dan PA Yogyakarta dan Sleman tahun 1988 dan 1997

Dari putusan tersebut dapat ditarik suatu hubungan bahwa kemandirian secara ekonomi dari isteri mempengaruhi penggunaan haknya untuk mengajukan perceraian apabila ada alasan untuk itu. Kemandirian secara ekonomi lebih banyak mendorong isteri untuk memilih hidup sendiri (bercerai) dari pada harus hidup bersama dalam suasana yang tidak bahagia sebagaimana menjadi tujuan perkawinan. Sebaliknya, perceraian oleh isteri yang tidak bekerja secara produktif jauh lebih sedikit, karena pilihan cerai akan mengantarkannya pada kehidupan sendiri yang jauh lebih berat secara ekonomi. Sedikitnya tuntutan cerai oleh isteri tidak bekerja juga dapat menggambarkan suatu hubungan bahwa semakin isteri tidak mandiri secara ekonomi, semakin tergantung ia pada suami dan semakin tidak mungkin bagi dia untuk memilih hidup sendiri (bercerai). Apabila bercerai, secara

diberi nafkah, terpaksa harus mencari pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, dari segi kebutuhan ekonomi tidak menjadi masalah apabila kemudian ia memperoleh pekerjaan yang layak. Akan tetapi setelah tidak diberi nafkah oleh suami, isteri yang sebelumnya memang tidak bekerja kemudian tetap sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, maka hal tersebut akan menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi bekas isteri tersebut. Dari mana ia akan menghidupi dirinya dan anak-anaknya setelah ditinggal dan tidak diberi nafkah oleh suami ?

Alasan yang banyak dipergunakan oleh isteri yang tidak bekerja dalam mengajukan perceraian tidak jauh berbeda dengan alasan yang diajukan oleh isteri yang bekerja secara produktif, yakni suami pergi dengan tidak memberi nafkah serta alasan suami serong dengan tidak memberi nafkah. Apabila usia isteri tersebut masih muda serta berpendidikan tinggi, maka kesempatan untuk bersaing dalam mencari pekerjaan masih terbuka. Akan tetapi apabila usia isteri yang tidak bekerja tersebut sudah agak tua dan dengan bekal pendidikan yang dimiliki kurang memadai, maka kesempatan baginya untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan yang layak menjadi lebih kecil. Bagi kelompok demikian kesempatan untuk mendapatkan penghasilan hanya terbatas pada sektor-sektor informal saja.

Para isteri yang mengalami beban ekonomi berat apabila diceraikan oleh suaminya, atau ia sendiri yang mengajukan perceraian, mestinya memperoleh perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU No.1 Tahun 1974 dalam hukum perkawinan adalah

adanya hak bagi isteri untuk menuntut nafkah bagi dirinya sampai ia kawin lagi dan bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa (Pasal 41 ayat 2 dan 3 UU No.1 Tahun 1974). Bentuk perlindungan hukum lain yang diberikan oleh hukum adalah adanya prinsip untuk mempersulit perceraian (Pasal 39 serta Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974). Meskipun ketentuan hukum telah memberi perlindungan hukum bagi wanita dalam perceraian, namun belum tentu dalam pelaksanaannya demikian.

B. Perlindungan Dalam Pelaksanaan Hukum Terhadap Posisi Wanita Dalam Perceraian.

1. Perhatian hakim terhadap perceraian oleh suami dengan menggunakan kedudukan isteri sebagai alasan.

Dari seluruh gugatan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap isteri, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, dalam alasannya ada yang berhubungan dengan kedudukan isteri. Alasan-alasan tersebut adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 8 berikut.

Tabel 8: Perceraian oleh suami dengan alasan kedudukan isteri

No.	Bentuk alasan	Jumlah
1.	cekcok karena isteri bekerja sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik	11
2.	Isteri tidak melaksanakan kewajiban, tapi ternyata suami serong	1
3.	Isteri tidak mau ikut suami sebagai kepala rumah tangga	1
4.	Isteri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik	2
5.	Cekcok karena tidak ingin isteri berpendidikan lebih tinggi	1
6.	Isteri tidak patuh dan berani pada suami	1
7.	Isteri pergi, ternyata isteri dihina karena tidak bekerja dan ditinggal kawin lagi	1
	Jumlah	18

Sumber: putusan perceraian PN dan PA Yogyakarta dan Sleman tahun 1988 dan 1997.

Dari 38 gugatan perceraian oleh suami, 18 buah di antaranya menggunakan kedudukan isteri sebagai alasannya. Alasan yang paling banyak diajukan adalah bekerjanya isteri sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keadaan tersebut menunjukkan masih lekatnya budaya patriarki dalam pandangan suami, dimana UU No.1 Tahun 1974 juga masih menganutnya (lihat Pasal 31 ayat 3 beserta Pasal 34 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974). Pandangan patriarki tersebut tentu saja dapat menyebabkan ketidakadilan bagi isteri yang ingin bekerja secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri sekaligus untuk mengaktualisasikan kemampuannya.

Meskipun dalam penelitian ini masing-masing hanya ditemukan satu kasus, adanya alasan isteri tidak mau ikut dengan suami, alasan suami yang tidak menginginkan isterinya berpendidikan lebih tinggi darinya, serta

alasan isteri tidak patuh pada suami, merupakan manifestasi budaya patriarki. UU No.1 Tahun 1974 menetapkan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974). Rumah tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama (Pasal 32 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974). Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya ada hak yang sama dari suami maupun isteri untuk menentukan dimana mereka akan menetapkan tempat kediamannya. Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.41/Pdt/G/1997/PA.Yk. , suami mendalilkan bahwa isterinya tidak mau ikut dengannya dan maunya suami yang disuruh ikut dengan isterinya di rumah peninggalan orang tua isterinya. Suami tidak mau karena letaknya di luar kota tempat ia bekerja. Sedangkan isterinya mengemukakan alasan bahwa pekerjaan suaminya tidak tetap, kadang ada kadang tidak ada. Dari pada harus tinggal di rumah kontrakan, menurut isteri lebih baik menempati rumah warisan orang tua.(dikutip dari: halaman 2 putusan). Situasi tersebut menimbulkan percekcoan dan berakhir dengan diajukannya gugatan cerai oleh suami. Alasan suami yang mendalilkan bahwa cekcok disebabkan karena isterinya tidak patuh dan tidak mau ikut dengannya sebenarnya bertentangan dengan Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 serta menyebabkan ketidakadilan bagi isteri karena dengan diterimanya alasan tersebut, seolah-olah dalam menetapkan tempat kediaman isteri harus ikut dan tunduk dengan suami. Prinsip isteri harus ikut suami memang tidak selamanya buruk, sepanjang prinsip tersebut tidak membawa kerugian pada pihak isteri.

Namun UU No.1 Tahun 1974 cenderung untuk tidak menganutnya. Besar kemungkinan para pembuat UU No.1 Tahun 1974 lebih banyak melihat dampak ketidakadilannya prinsip tersebut.

Isteri sebagai manusia mempunyai hak yang sama untuk diberi kesempatan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, sejajar dengan laki-laki. Oleh karena itu alasan gugatan perceraian oleh suami dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 74/Pdt/G/1988/PN.Yk. yang tidak menginginkan isterinya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi darinya, adalah bertentangan dengan persamaan hak tersebut dan tentu saja sangat merugikan pihak isteri yang ingin meningkatkan pendidikannya.

Pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman No.65/Pdt/G/1988/PN.Slmn, suami sebagai penggugat mendalilkan bahwa isterinya tidak patuh dan berani pada suami hingga mereka cekcok terus. Di dalam persidangan terbukti bahwa keadaan yang sebenarnya adalah suami mempunyai pacar dan tidak memberi nafkah pada isterinya (dikutip dari: halaman 2,4,5 dari putusan).

Sebagaimana terjadi pada kasus-kasus perceraian yang lain yang telah diuraikan sebelumnya, nampak suami telah memutarbalikkan fakta seolah-olah isterinya yang bersalah sehingga digugat cerai. Ketidakadilan lagi-lagi menimpa pihak isteri. Alasan yang dipergunakannya juga menunjukkan betapa masih ada suami yang mempunyai pandangan patriarkis, dengan beranggapan bahwa isteri harus patuh dan tidak boleh berani pada suami. Sementara di sisi lain suami yang harus dipatuhi dan

dihormati ternyata melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyakitkan hati isteri. Apakah isteri sekaligus juga tidak boleh menentang apabila suaminya punya pacar ?

Serong dalam beberapa kasus pada penelitian ini ternyata memang bukan monopoli suami saja (lihat data pada tabel 4, 5, 6, 7). Isteri ternyata juga ada yang melakukan hal yang sama. Apabila salah satu pihak serong, maka pihak yang lain menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 serta Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, berhak mengajukannya sebagai alasan perceraian. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa suami atau isteri boleh begitu saja memutarbalikkan fakta, dengan mengemukakan alasan seolah-olah pihak yang digugat yang bersalah. Harapan untuk memperoleh keadilan bagi isteri kemudian tertuju pada hakim sebagai pemutus perkara.

Data tentang perhatian hakim terhadap perceraian oleh suami yang menggunakan kedudukan isteri sebagai sumber alasannya dapat dilihat pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim berikut alasannya. Dari 80 putusan perceraian, hampir semuanya mengabulkan gugatan penggugat, baik penggugatnya suami atau penggugatnya isteri. Hanya ada dua putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak, yakni pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sleman dengan No.61/Pdt/G/1988/PN.Slmn, serta perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No.122/Pdt/G/1988/PN Yk.

Pada perkara perceraian dengan putusan No.61/Pdt./G/1988 di Pengadilan Negeri Sleman, penggugatnya adalah suami. Dalam gugatannya suami mendalilkan bahwa mereka cekcok terus menerus karena tidak cocok sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang bahagia (dikutip dari: halaman 2 putusan). Di pengadilan terbukti bahwa cekcok tersebut tidak terus menerus dan hanya cekcok ringan, karena saksi yang diajukan penggugat sendiri juga melihat suami isteri tersebut sering tetap pergi berdua (dikutip dari: halaman 7, 8, 9 putusan). Di pengadilan juga terbukti bahwa penyebab cekcok bukan karena tidak cocok, akan tetapi karena suami sendiri telah menyeleweng. Isteri juga menyatakan tidak mau diceraikan dan akan tetap bersedia melayani suaminya (dikutip dari halaman 10, dan 11 putusan). Hakim dalam putusannya telah menolak gugatan suami tersebut dengan pertimbangan: (1) tidak terbukti cekcok terus menerus, bahkan terbukti justru suami sebagai penggugat telah menyeleweng hingga menyebabkan cekcok, (2) Suami sebagai penggugat seharusnya membimbing isterinya sebagai tergugat bila tidak ada kecocokan sehingga dapat dibetulkan sehingga tujuan perkawinan kekal akan tercapai, (3) Isteri sebagai tergugat tidak mau diceraikan dan siap melayani penggugat sebagai suaminya (dikutip dari: halaman 14, 15 dan 16 putusan).

Dalam perkara perceraian dengan putusan no.122/Pdt/G/1988 di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai penggugat adalah isteri. Dalam gugatannya isteri mendalilkan bahwa mereka cekcok karena tergugat sebagai suaminya sering cemburu bila penggugat pergi bekerja, sementara suaminya

malas mencari pekerjaan. Suami menyatakan bahwa ia cemburu karena isterinya kalau pulang sering diboncengkan oleh teman laki-lakinya. Isterinya mengakui bahwa ia sering diboncengkan, akan tetapi bukan berarti ia menyeleweng (dikutip dari: halaman 3, 5, 7 putusan). Di persidangan terbukti bahwa cecok terjadi tidak terus menerus. Berdasarkan hal tersebut hakim dalam putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak, dengan alasan atau pertimbangan: (1) alasan cecok karena suami tidak bekerja dan pencemburu memang terbukti, akan tetapi sebenarnya masih dapat diatasi asal mereka mau saling pengertian (dikutip dari: halaman 22 putusan).

Dua contoh putusan diatas menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum serta Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974. Hakim tidak dapat begitu saja menerima alasan yang diajukan oleh penggugat, melainkan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan bagi pihak yang lainnya. Hakim di sini bukan hanya sebagai corong Undang-Undang saja, melainkan memutus dengan hati nuraninya disertai pertimbangan keadilan. Seandainya hakim-hakim yang lain mempunyai perhatian yang sama dengan hakim pada kedua perkara perceraian tersebut, maka angka perceraian besar kemungkinan dapat ditekan. Pada akhirnya, isteri yang cenderung selalu menjadi *victim*, mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan hukum melalui kebijaksanaan hakim dalam putusannya. Namun sayang bahwa putusan hakim yang didasarkan pada keadilan dan kebijaksanaan tersebut

jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan hakim yang hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang, atau bertindak formalistis.

Hampir seluruh putusan dalam penelitian ini menjatuhkan putusan berupa mengabulkan gugatan penggugat, baik penggugatnya isteri maupun penggugatnya suami. Alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9: Pertimbangan yang dipakai hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian oleh suami dengan menggunakan kedudukan isteri sebagai alasan

No.	Alasan dikabulkannya gugatan	Jumlah
1.	Karena terbukti cekcok, tanpa mempertimbangkan penyebabnya	15
2.	Karena terbukti ada perempuan lain dan mereka tidak berhubungan lagi	1
3.	Karena tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan baik dan bahagia	1
4.	Terbukti mengakui dalil penggugat	1
	Jumlah	18

Sumber: Putusan perceraian PN dan PA Yogyakarta dan Sleman tahun 1988 dan 1997.

Alasan yang paling banyak dikemukakan oleh hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian oleh suami dengan menggunakan alasan yang berhubungan dengan kedudukan isteri adalah terbuhtinya cekcok secara terus menerus, tanpa mempertimbangkan penyebab dari percekcoan. Pertimbangan demikian sebenarnya kurang cukup, karena berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa gugatan dapat diterima

apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Di dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apabila benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri. Dengan dikabulkannya gugatan perceraian karena cecok terus menerus terbukti, tanpa mempertimbangkan penyebabnya, menimbulkan penafsiran seolah-olah hakim mudah sekali menceraikan perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam PP No.9 Tahun 1975 tersebut, maka hakim seharusnya mempertimbangkan apa penyebab dari percecokan dan apakah penyebab tersebut sangat prinsipil bagi keutuhan rumah tangga suami isteri. Apabila tidak prinsipil, maka atas nama keadilan (bukan hanya Undang-Undang saja), hakim wenang untuk menolak gugatan perceraian, sebagaimana terjadi dalam dua putusan sebelumnya. Dalam mempertimbangkan prinsip dan tidaknya penyebab perceraian ini hakim dapat memerankan kebijaksanaannya melalui penafsiran.

Atas nama keadilan (terutama bagi isteri yang cenderung menjadi *victim*), dalam mempertimbangkan penyebab perceraian yang berhubungan dengan kedudukan isteri, hakim dapat saja mempertimbangkan:

- a. bahwa bekerjanya isteri hingga menyebabkan ia kurang dapat melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga adalah tidak prinsip, sehingga gugatan perceraian oleh suami dengan alasan demikian dapat ditolak, kecuali isteri sendiri juga menghendaki perceraian tersebut.

- b. Atas nama keadilan, dalam mempertimbangkan penyebab cekcok adalah suami tidak menginginkan isterinya berpendidikan lebih tinggi darinya, hakim dapat saja menafsirkan bahwa penyebab tersebut tidak prinsip bahkan bertentangan dengan hak asasi isteri untuk memperoleh kesempatan mencapai pendidikan sesuai kemampuannya, sehingga gugatan perceraian oleh suami dengan alasan demikian dapat ditolak, kecuali isteri sendiri juga menghendaki perceraian tersebut.
- c. Atas nama keadilan, dalam mempertimbangkan penyebab cekcok adalah isteri tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, akan tetapi ternyata terbukti bahwa penyebabnya karena justru suami yang serong dan tidak mau tahu urusan rumah tangga, hakim dapat saja menafsirkan bahwa alasan tersebut tidak prinsip bahkan tidak adil karena penyebabnya bukan dari pihak yang digugat, akan tetapi justru datang dari pihak penggugatnya, sehingga gugatan perceraian oleh suami dengan alasan demikian dapat ditolak, kecuali isteri juga menghendaki perceraian tersebut.

Dalam perceraian yang diajukan oleh suami memang ada sebagian isteri yang juga menghendaki perceraian, akan tetapi sebagian lainnya sebenarnya tidak menghendaki perceraian tersebut.

4. Penerapan Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU No.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian Oleh Suami Atau Isteri.

Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU No.1 Tahun 1974 mengatur tentang tanggung jawab suami atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya, serta kewajiban suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isterinya, sebagai akibat dari perceraian. Tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak serta tuntutan nafkah bagi bekas isteri tersebut dapat diajukan selama berlangsungnya gugatan perceraian (Pasal 24 PP No.9 Tahun 1975). Dari pengalaman peneliti sendiri selama beracara di pengadilan, dalam pelaksanaannya sebagian hakim menafsirkan bahwa tuntutan tersebut harus diajukan secara terpisah dengan gugatan perceraianya, karena yang satu dapat diperiksa dalam persidangan yang terbuka, sedang yang lain harus dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Penerapan Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU No.1 Tahun 1974 dalam perceraian, baik yang diajukan oleh suami atau oleh isteri dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 10: Penerapan Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU No.1 Tahun 1974 dalam perceraian.

	Perceraian oleh atau terhadap isteri tidak bekerja	perceraian oleh atau terhadap isteri bekerja
ya	6	15
berupa	<ul style="list-style-type: none"> - nafkah iddah : 2 - nafkah anak : 3 - nafkah madhiyah dan mut'ah : 1 	<ul style="list-style-type: none"> - nafkah iddah : 5 - nafkah anak : 7 - nafkah yg.tdk.diberikan : 1 - nafkah isteri & anak : 2
tidak	15	44
alasan	<ul style="list-style-type: none"> - isteri tdk.nuntut : 7 - isteri tdk.nuntut tapi suami sebenarnya setuju : 2 - isteri tdk nuntut krn. tdk.tahu alamat suami : 4 - hrs.diajukan tersendiri padahal isteri nuntut : 2 	<ul style="list-style-type: none"> - isteri tdk.nuntut : 24 - isteri tdk nuntut krn. tdk.tahu alamat suami : 14 - hrs.diajukan tersendiri padahal isteri nuntut : 2 - isteri tdk.nuntut krn. suami tdk.kerja/gaji kecil : 4

Sumber: putusan perceraian PN dan PA Yogyakarta dan Sleman tahun 1988 dan 1997.

Sebagaimana terlihat pada tabel 10, dalam memeriksa tuntutan nafkah pada gugatan perceraian, hakim mempunyai pandangan yang mendua, yakni di satu sisi dapat mengabulkan tuntutan tersebut, di sisi lain tidak dapat mengabulkan dengan alasan harus diajukan secara terpisah. Dalam penelitian ini misalnya, terlihat pada putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 111/Pdt/G/1997/PN Slmn, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.121/Pdt/G/1988/PN Yk.dan No.81/Pdt/G/1988/PN Yk. Umumnya orang akan menuntut apa yang menjadi haknya. Dengan demikian salah satu kemungkinan isteri tidak menuntut nafkah adalah adanya pemahaman bahwa tuntutan tersebut harus diajukan secara terpisah, di samping adanya alasan-alasan lainnya, yakni (1) karena suami pergi tidak diketahui alamatnya, (2) suami tidak kerja/gajinya pas-pasan. Dari dua alasan terakhir tidak

diajukannya tuntutan nafkah oleh isteri tersebut, nampak bahwa isteri tidak punya pilihan lain untuk menuntut nafkah yang menjadi haknya tersebut. Kemana tuntutan nafkah akan dimintakan seandainya alamat suami yang meninggalkannya saja tidak diketahui ? Dari mana akan menuntut nafkah kalau suami tidak kerja atau gajinya pas-pasan ?

Sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, hakim dapat mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada bekas isterinya. Namun dalam praktek, sebagaimana dalam penelitian ini, ketentuan Pasal tersebut ditafsirkan bahwa hakim hanya akan mewajibkan suami memberi nafkah pada isteri atau anak apabila ada tuntutan untuk itu, sekalipun suami menyatakan sanggup memberi nafkah (lihat pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.10/Pdt/G/1988/PN Yk. serta putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.151/Pdt/G/1988/PA Yk.). Bahkan ada hakim yang masih berpandangan bahwa tuntutan nafkah harus diajukan secara terpisah. Jarang sekali ada hakim yang menafsirkan bahwa suami dapat diwajibkan memberi nafkah sekalipun isteri tidak menuntutnya. Hanya ada satu contoh hakim yang berpandangan demikian, yakni pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.174/Pdt/G/1988/PA Yk.

Lebih banyaknya putusan hakim yang tidak mewajibkan suami untuk memberi nafkah pada bekas isteri dan anak-anaknya dengan berbagai alasan sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, secara umum akan memberi dampak pada perekonomian bekas isteri dan anak-anak yang ditanggungnya, karena pendapatan keluarga mereka menjadi berkurang atau sama sekali tidak

ada, terutama bagi isteri yang sebelumnya tidak bekerja. Sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Hidayati Amal, keadaan ekonomi rumah tangga yang dikepalai isteri lebih miskin dari keadaan ekonomi rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki (dalam T.O Ihromi, Ed., 1995: 116).



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Tentang posisi wanita dalam perceraian, dari segi penggunaan hak pengajuan perceraian, sudah banyak isteri yang mempunyai keberanian untuk mengajukan gugat cerai terhadap suaminya, namun keberanian tersebut masih didominasi oleh isteri yang bekerja secara produktif. Dari segi alasan diajukannya perceraian, pada umumnya isteri masih dalam posisi sebagai pihak korban yang diperlakukan secara tidak adil, baik ketidakadilan pada umumnya, maupun ketidakadilan yang bersifat diskriminatif gender.

Tentang perlindungan dalam pelaksanaan hukum terhadap posisi isteri dalam perceraian, hakim masih banyak sebagai corong Undang-Undang dan belum banyak yang memberikan perlindungan atas nama keadilan, terutama keadilan yang berpersepektif wanita. Banyaknya putusan yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 dengan berbagai alasan yang ada, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap posisi wanita dalam perceraian belum banyak dilakukan oleh hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut.

Masih perlu adanya sosialisasi keadilan jender bagi para suami, sehingga mereka tidak lagi menggunakan kedudukan isteri sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

Hakim di dalam memutus perkara hendaknya mempunyai pandangan yang sama serta tidak berpandangan hanya sebagai corong Undang-Undang saja, karena Undang-Undang Perkawinan kita yang mengatur kedudukan suami isteri dalam rumah tangga bersifat patriarkis dan lebih sering membawa ketidakadilan bagi isteri, agar dalam pelaksanaan lebih banyak memberikan perlindungan kepada isteri yang masih cenderung sebagai korban. Berdasarkan hal tersebut perlu segera dipikirkan untuk mengadakan pembaharuan ketentuan hukum yang lebih adil tentang kedudukan suami isteri dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Mary, *Jender dan Pembangunan*, Makalah Pada Pelatihan Metodologi Penelitian Berwawasan Kemitrasejajaran, PSW-UGM, 15-16 Oktober 1996.
- Barnhouse, Ruth Tiffani, 1991, *Identitas Wanita*, Terjemahan A.G Lunandi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ihromi, T.O, Editor, 1995, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Edisi IV, Liberty, Yogyakarta.
- Munandar, S.C Utami, Editor, 1985, *Emansipasi dan Peran ganda Wanita Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Ridjal, Fauzi, dkk., Editor, 1993, *Dinamika dan Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- -----, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial*.
- -----, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974*.
- -----, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Shaevitz, Marjori Hansen, 1991, *Wanita Super*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Soemijati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sundari, E, 1995, *Kebijaksanaan Hakim Dalam Mengadili Perkara Perceraian Katholik di DIY*.

PERSONALIA PENELITIAN

1. Ketua peneliti:

- a. Nama lengkap & gelar : Elisabeth Sundari, S.H
- b. Golongan/pangkat : III-C, Penata
- c. Jabatan fungsional : Dosen hukum, Fak.Hukum UAJY
- d. Jabatan struktural : -
- e. Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu hukum
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- g. Bidang keahlian : Hukum Acara, Hukum Perkawinan
- h. Waktu untuk penelitian : 15 jam/minggu

2. Anggota peneliti:

- a. Nama lengkap & gelar : Dra.M.G Endang Sumiarni,S.H,M.Hum.
- b. Golongan/pangkat : IV-A, Pembina
- c. Jabatan fungsional : Dosen hukum
- d. Jabatan struktural : Ketua Bagian Hukum & Masyarakat
- e. Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- g. Bidang keahlian : Hukum Perkawinan, Adat
- h. Waktu untuk penelitian : 10 jam/minggu

3. Tenaga lapangan : 2 orang

4. Tenaga administrasi : 1 orang

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1988

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan
453/Pdt/G/1988 alasan: cekcok krn.tdk.	450/Pdt/G/1988 alasan: isteri sakit shg.tdk. dpt.melaksanakan kewajiban dg.baik				krn.isteri tidak nuntut krn.isteri tidak nuntut			terbukti isteri mengakui krn.tdk.mungkin bina rumah tangga dg.baik & bahagia
472/Pdt/G/1988 alasan: isteri ikut kerja shg.hubungan tdk.har- monis	465/Pdt/G/1988 alasan: cekcok krn.tdk.punya anak				isteri tdk.nuntut krn.gaji suami kecil krn.isteri tidak nuntut krn.isteri tidak nuntut			terbukti isteri mengakui terbukti mengakui terbukti mengakui
421/Pdt/G/1988 alasan: 40 tahun belum punya anak	203/Pdt/G/1988 alasan: suami pergi & tdk.beri nafkah 638/Pdt/G/1987 alasan: suami				krn.isteri tidak nuntut & tdk.ta- hu alamat suami krn.isteri tidak nuntut & tdk.ta			terbukti suami pergi terbukti suami pergi

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1988

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulk
		pergi & tdk. beri nafkah			hu alamat suami			terbukti suami pergi
		500/Pdt/G/1987 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah			krm.isteri tidak nuntut			terbukti cekcok
		357/Pdt/G/1988 alasan: ceckok & suami suka menganiaya			krm.isteri tidak nuntut			terbukti suami pergi
		637/Pdt/G/1987 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah			krm.isteri tidak nuntut			

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1997

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami	pertimb. putusan menolak		pertimb. putusan mengabulkan	
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak		pertimb. putusan mengabulkan	
512/Pdt/G/1996 alasan: isteri ikut kerja shg. jadi cecok				hanya nafkah mutah, iddah krn. isteri tdk nuntut nafkah yg. lain		isteri ikut kerja shg. menjadi cecok			terbukti cecok tanpa mempertimbangkan alasan	
15/Pdt/G/1996 alasan: isteri serong		172/Pdt/G/1996 alasan: isteri pulang ke orang tua			isteri tdk. nuntut krn. suami tdk. kerja				terbukti isteri pulang ke orang tua	
06/Pdt/G/1996 alasan: cecok krn. isteri kerja					krn. isteri tidak nuntut				terbukti isteri mengakui	
	500/Pdt/G/1996 alasan: isteri pulang ke orang tuanya			suami bayar nafkah iddah, mut'ah nafkah anak, sesuatu kesepakatan	krn. isteri tidak nuntut	cecok krn. isteri kerja			terbukti cecok	
	509/Pdt/G/1996 alasan: isteri tdk. melaksanakan kewajiban, ternyata suami juga			hanya nafkah madiyah, mut'ah		isteri tdk. melaksanakan kewajiban, ternyata suami juga			terbukti isteri pulang ke orang tua	
	501/Pdt/G/1997 alasan: cecok krn. gaji suami				gaji suami kecil shg. isteri tdk.				terbukti cecok, tanpa melihat penyebabnya	
									terbukti cecok & terbukti gaji : mi habis untuk bayar hutang	

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1997

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan
		kurang 412/Pdt/G/1996 alasan: suami per- gi & tdk.beri nafkah			nuntut krm.isteri tidak nuntut & tdk.ta- hu alamat suami			terbukti suami pergi
		377/Pdt/G/1996 alasan: suami per- gi & tdk.beri nafkah			krm. isteri tidak nuntut & tdk.ta- hu alamat suami			terbukti suami pergi
		390/Pdt/G/1996 alasan: suami per- gi & tdk.beri nafkah			krm. isteri tidak nuntut & tdk.ta- hu alamat suami			terbukti suami pergi

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 1988

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		pertimb. putusan mengabulkan:	
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan:	
		83/Pdt/G/1988 alasan: suami serong & tidak beri nafkah		hanya nafkah iddah				terbukti suami serong	
		13/Pdt/G/1988 alasan: suami tdk. beri nafkah & suka aniaya			krn. isteri tidak nuntut			terbukti suami pemabok & suka menganiaya	
		53/Pdt/G/1988 alasan: suami serong & tidak beri nafkah			krn. isteri tidak nuntut			terbukti cecok	
		254/Pdt/G/1988 alasan: suami pergi & tidak beri nafkah			krn. isteri tidak nuntut			terbukti suami pergi	
		252/Pdt/G/1987 alasan: suami serong & tidak beri nafkah			krn. isteri tidak nuntut			terbukti cecok	
289/Pdt/G/1987 alasan: cecok krn. isteri ikut kerja shg. hub. jadi tdk. harmonis				hanya nafkah iddah & mut'ah		isteri ikut kerja shg. hubungan jadi tdk. harmonis		terbukti cecok tanpa melihat alasan	

perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan alasan perceraian oleh suami	
kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak p
			krn. isteri tidak nuntut		
		hanya nafkah iddah krn. isteri tdk nuntut nafkah lain	padahal suami sudah sanggup		
		hanya nafkah iddah krn. isteri tdk nuntut nafkah lain			
		suami bayar nafkah anak sesuai kesanggupannya padahal isteri tdk nuntut			

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		pertimb. putusan mengabulkan
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	
273/Pdt/G/1987 alasan: cecok karena tidak cocok					krn. isteri tidak menuntut			terbukti cecok
167/Pdt/G/1988 alasan: cecok krn.isteri tdk puas gaji suami kmdn.ikut kerja	151/Pdt/G/1988 alasan: cecok krn.tdk.cocok			hanya nafkah iddah krn. isteri tdk.nuntut nafkah lain	padahal suami sudah sanggup			terbukti cecok
	65/Pdt/G/1988 alasan: cecok krn.isteri tdk.puas gaji, tapi ternyata suami serong			hanya nafkah iddah krn.isteri tdk.nuntut nafkah lain				terbukti cecok
	174/Pdt/G/1988 alasan: isteri serong			suami bayar nafkah anak sesuai kesanggupannya padahal isteri tdk menuntut				terbukti cecok

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 1997

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		pertimb. putusan mengabulkan
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan		
33/Pdt/G/1997 alasan: cekcok krn.isteri kerja shg.tdk dpt. melaksanakan kewajiban dg.baik				suami bayar nafkah yg dilalaikan nafkah iddah, mut'ah & nafkah anak		isteri kerja shg.tdk. dpt.melaksanakan kewajiban dg.baik	terbukti cekcok tanpa melihat alasan & isteri juga pasrah	
32/Pdt/G/1997 alasan: isteri pergi	41/Pdt/G/1997 alasan: cekcok krn.isteri tdk. patuh untuk ikut suami			hanya nafkah iddah krn.isteri akan kerja		isteri tdk. taat untuk ikut suami & bah-kan suami yg.hrs. ikut isteri	terbukti isteri pergi	
42/Pdt/G/1997 alasan: cekcok krn.tdk. harmonis, tapi ternyata terbukti suami serong				suami bayar nafkah terutang, iddah, mut'ah & nafkah isteri & anak			terbukti cekcok tanpa melihat alasan	
	44/Pdt/G/1997 alasan: isteri kurang bertanggung jawab, tapi ternyata suami punya pacar lagi			suami bayar nafkah iddah, mut'ah & nafkah anak sesuai tuntutan isteri		isteri kurang bertanggung jawab, tapi ternyata suami punya pacar lagi	terbukti cekcok tanpa melihat alasan/penyebab	

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 1997

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		pertimb. putusan mengabulkan
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	
		45/Pdt/G/1997 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah			krm.isteri tidak menuntut & tdk. tahu alamat suami			terbukti suami pergi
			05/Pdt/G/1997 alasan: suami serong, pergi & tdk. beri nafkah		krm.isteri tidak menuntut & tdk. tahu alamat suami			terbukti suami pergi
			31/Pdt/G/1997 alasan: suami serong & tdk. beri nafkah		krm.isteri tidak menuntut			terbukti serong
		36/Pdt/G/1997 alasan: cekcok, suami suka aniaya			krm.isteri tidak menuntut			terbukti cekcok

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 1988									
perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		pertimb. putusan mengabulkan	
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan	
61/Pdt/G/1988 alasan: cekcok, ternyata suami justru serong					km. isteri tdk. nuntut		km. suami sendiri yg. serong isteri bersedia melayani suami, tdk. terbukti cekcok terus menerus & kalau tdk. cocok harusnya suami membimbing isteri sehingga dapat dibetulkan		
65/Pdt/G/1988 alasan: isteri tdk. patuh & berani pada suami		59/Pdt/G/1988 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah		tapi hanya nafkah 5 bln. yg. tdk. diberikan	km. isteri tdk. menuntut & tdk. tahu alamat suami			terbukti suami pergi	
		60/Pdt/G/1988 alasan: suami serong, mengusir & tdk. beri nafkah		km. isteri menuntut nafkah anak		isteri tdk. patuh & berani pada suami		terbukti cekcok tanpa melihat alasan	
		56/Pdt/G/1988 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah			km. isteri tdk. menuntut			terbukti mabok & pisah	
								terbukti pergi	

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 1988									
perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		pertimb. putusan mengabulkan	
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan	
61/Pdt/G/1988 alasan: cekcok, ternyata suami justru serong					km. isteri tdk. nuntut		km. suami sendiri yg. serong isteri bersedia melayani suami, tdk. terbukti cekcok terus menerus & kalau tdk. cocok harusnya suami membimbing isteri sehingga dapat dibetulkan		
65/Pdt/G/1988 alasan: isteri tdk. patuh & berani pada suami		59/Pdt/G/1988 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah		tapi hanya nafkah 5 bln. yg. tdk. diberikan	km. isteri tdk. menuntut & tdk. tahu alamat suami			terbukti suami pergi	
		60/Pdt/G/1988 alasan: suami serong, mengusir & tdk. beri nafkah		km. isteri menuntut nafkah anak		isteri tdk. patuh & berani pada suami		terbukti cekcok tanpa melihat alasan	
		56/Pdt/G/1988 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah			km. isteri tdk. menuntut			terbukti mabok & pisah	
								terbukti pergi	

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 1988

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan
		51/Pdt/G/1988 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah			krn. isteri tdk. nuntut & tdk. tahu alamat suami			terbukti cecok & suami pergi
	48/Pdt/G/1988 alasan: isteri pergi, ternyata terbukti isteri sering dihina & ditinggal kawin lagi				krn. isteri tdk. nuntut	isteri dihina krn.tdk kerja & ditinggal kawin lagi		terbukti ada WIL & mereka tdk berhubungan lagi
47/Pdt/G/1988 alasan: isteri serong					krn.isteri tdk. nuntut			terbukti cecok

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 1997

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami	
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan	
148/Pdt/G/1997 alasan: isteri pergi		115/Pdt/G/1997 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah			krn. isteri tdk. nuntut & tdk. tahu alamat suami			terbukti cecok & suami pergi	
	111/Pdt/G/1997 alasan: cecok krn. isteri tdk. melaksanakan kewajiban dg. baik				krn. isteri tdk. nuntut			terbukti cecok & isteri pergi krn suami jadi para normal & sering ada tamu pria/wanita menginap di rumah	
		83/Pdt/G/1997 alasan: suami pergi & tdk. beri nafkah			krn. isteri tdk. nuntut & tdk. tahu alamat suami	krn. isteri tdk. me- laksanakan kewaji- ban dg.baik		terbukti cecok & suami tdk. mau tahu urusan rumah tangga	
		81/Pdt/G/1997 alasan: suami pergi & tidak beri nafkah			krn. isteri tdk. nuntut & tidak tahu alamat suami			terbukti suami pergi	
			85/Pdt/G/1997 alasan: suami pergi & tidak beri nafkah		krn. isteri tidak nuntut & tidak tahu alamat suami			terbukti suami pergi	

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 1997

perceraian oleh suami		perceraian oleh istri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		
terhadap istri kerja	terhadap istri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan
14/Pdt/G/1997 alasan: cecok km.istri-ri pergi cari kerja			41/Pdt/G/1997 alasan: suami serong & tidak beri nafkah		km. istri tidak nuntut	km. istri tidak nuntut		suami mengakui
79/Pdt/G/1997 alasan: istri serong sampai punya anak					km. istri tidak nuntut	km. istri tidak nuntut		terbukti cecok tanpa melihat alasan
03/Pdt/G/1997 alasan: istri serong					km. istri tidak nuntut	km. istri tidak nuntut		terbukti istri serong sampai pur anak
		44/Pdt/G/1997 alasan: suami serong & tidak beri nafkah			km. istri tidak nuntut	km. istri tidak nuntut		terbukti istri serong
16/Pdt/G/1997 alasan: istri kerja shg. tdk. dpt. melaksanakan kewajiban dg baik					km. istri tidak nuntut	istri bekerja shg. tdk. dpt. melaksanakan kewajiban dg. baik		terbukti suami serong & tidak m kembali lagi
								terbukti cecok & suami kasar

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 1988

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		pertimb. putusan mengabulkan	
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan	
no. 121/Pdt/G/1988 alasan: cecok, ternyata suami serong	no. 10/Pdt/G/1988 alasan: cecok krn. isteri serong				krn. isteri tdk nuntut, pdhl suami sdh. setuju			terbukti cecok	
					alasan: hrs diajukan sec. terpisahkan			terbukti cecok & suami serong	
		no. 13/Pdt/G/1988 alasan: cecok krn. suami serong & tdk. beri nafkah		krn. anak diasuh ibu				terbukti cecok & suami serong	
	no. 74/Pdt/G/1988 alasan: cecok krn. suami tdk. suka isteri berpendidikan lebih tinggi				krn. isteri tdk. nuntut	suami tdk. suka isteri berpendidikan lebih tinggi		krn. terbukti cecok tanpa melih. alasan	
		no. 81/Pdt/G/1988 ceccok krn. suami serong & tdk. beri nafkah			alasan: harus diajukan sec. terpisahkan			terbukti cecok	
			no. 85/Pdt/G/1988 suami pergi & tdk. beri nafkah		krn. isteri tdk. nuntut & tdk. tahu alamat suami			terbukti suami pergi	

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 1988

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		pertimb. putusan mengabulkan	
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan	
		88/Pdt/G/1988 alasan: cecok		krn. isteri nuntut				terbukti cecok	
		102/Pdt/G/1988 alasan: suami kawin lagi & tdk. beri nafkah		krn. isteri nuntut				terbukti suami kawin lagi	
		119/Pdt/G/1988 alasan: cecok krn. suami tdk. beri nafkah			krn. isteri tdk. nuntut			terbukti cecok	
		122/Pdt/G/1988 alasan: cecok krn. suami cemburu			krn. isteri tdk. nuntut		krn. menurut hakim suami tdk. kerja & pencemburu masih dapat diatasi & cecok hanya kadang-kadang		

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 1997					
nama	perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan alasan perceraian oleh suami
	kerja	tidak kerja	ya	tidak	
tidak isteri tidak kerja				tidak	sumber alasan
				krm. isteri tdk. nuntut	isteri ikut kerja shg. mengurangi hu-bungan
			krm. anak ikut isteri	krm. isteri tdk. nuntut	isteri kerja shg. tdk. dpt. melaksanakan kewajiban dengan baik
		58/Pdt/G/1997 alasan: suami tdk. beri nafkah	suami dihukum beri beaya anak, padahal isteri tdk. nuntut	krm. isteri tdk. nuntut, gaji suami kecil	isteri kerja shg. tdk. dpt. melaksanakan kewajiban dengan baik
	19/Pdt/G/1997 alasan: tdk. punya anak			krm. isteri tdk. nuntut	

19/Pdt/G/1997 alasan: tdk. pu- nya anak			krn. isteri tdk. nuntut	isteri ikut kerja shg. mengurangi hu- bungan
	58/Pdt/G/1997 alasan: suami tdk. beri nafkah	krn. anak ikut iste- ri	krn. isteri tdk. nuntut, gaji sua- mi kecil	isteri kerja shg. tdk. dpt. melaksanakan kewajiban dengan baik
		suami dihukum beri beaya anak, padahal isteri tdk. menuntut	krn. isteri tdk. nuntut	isteri kerja shg. tdk. dpt. melaksanakan kewajiban dengan baik

DATA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 1997

perceraian oleh suami		perceraian oleh isteri		penerapan Pasal 41 (2) & (3) UU No.1 Tahun 1974		Perhatian hakim terhadap penggunaan kedudukan wanita sebagai sumber alasan perceraian oleh suami		
terhadap isteri kerja	terhadap isteri tidak kerja	kerja	tidak kerja	ya	tidak	sumber alasan	pertimb. putusan menolak	pertimb. putusan mengabulkan
		36/Pdt/G/1997 alasan: suami pergi & tdk beri nafkah			krm. isteri tdk. nuntut, suami sudah punya WIL & tdk diked. tahu alamatnya			terbukti suami pergi
		21/Pdt/G/1997 alasan: suami pergi & tdk beri nafkah	39/Pdt/G/1997 alasan: suami serong & meng- aniaya	krm. isteri menuntut & anak ikut isteri	krm. isteri tdk. nuntut			terbukti cekcok & suami meng- aniaya
			20/Pdt/G/1997 alasan: suami pergi & tdk be- ri nafkah		krm. isteri tdk. nuntut & tdk. tahu alamat suami			terbukti cekcok & suami pergi
								terbukti suami pergi